



relevansi akuntansi nilai wajar (Kouki *et al*, 2016). Selama periode ini, pelaporan nilai wajar telah dibentuk kembali oleh standar pelaporan keuangan yang baru dan kompleks (Bens *et al*, 2015). Sebagian besar pengukuran nilai wajar diterapkan pada instrumen keuangan, penurunan nilai, serta pencatatan perolehan aset dan kewajiban yang ditanggung dalam kombinasi bisnis. Para penyusun standar akuntansi terus mencanangkan penggunaan nilai wajar sebagai ukuran yang relevan atas aset dan kewajiban untuk tujuan pelaporan keuangan (PWC 2015).

Pengukuran nilai wajar dan pengakuan dari nilai-nilai dalam laporan keuangan, bersamaan dengan pengungkapan yang memadai, akan memberikan informasi yang diperlukan dalam mengevaluasi eksposur perusahaan secara tepat terhadap risiko keuangan (Anonymous, 2002). Riedl dan Serafeim (2011) mendefinisikan risiko informasi sebagai kemampuan investor untuk memastikan parameter penilaian yang mendasari aset tertentu. Sistem pelaporan keuangan memberikan informasi yang memungkinkan pengguna untuk memperoleh parameter tersebut. Namun, variasi dari kualitas informasi ini dapat terjadi karena dua alasan: pertama, pengukuran atas tantangan yang melekat dalam unsur-unsur pelaporan; kedua, implementasi tingkat perusahaan. Kualitas pelaporan yang tinggi memungkinkan estimasi yang lebih baik dari parameter penilaian oleh pengguna laporan keuangan (yaitu risiko informasi rendah), sedangkan pelaporan kualitas yang lebih rendah menyebabkan estimasi yang lebih buruk atas parameter ini (yaitu, risiko informasi tinggi).

Pengungkapan kualitas informasi yang lebih tinggi menyebabkan beta lebih rendah dan dengan demikian biaya modal juga lebih rendah (Lambert *et al*, 2007). Riedl dan Serafeim (2011) menemukan bahwa perusahaan dengan lingkungan informasi yang berkualitas tinggi dapat mengurangi perbedaan risiko informasi dalam nilai wajar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa risiko informasi yang lebih besar terkait dengan aset keuangan dapat diminimalisir melalui lingkungan informasi perusahaan.



Penerapan akuntansi nilai wajar telah menjadi salah satu isu paling kontroversial dalam pelaporan keuangan dan menarik perhatian selama dua dekade terakhir. International Financial Reporting Standards (IFRS) yang digunakan oleh negara anggota European Union sejak tahun 2005, mewajibkan nilai wajar dapat atau harus digunakan dalam pengukuran, misalnya kewajiban pensiun, aset biologis (termasuk hutan), properti investasi, dan berbagai jenis aset keuangan dan liabilitas (termasuk derivatif) (Sundgren, 2013). Akuntansi nilai wajar dikambinghitamkan atas krisis kredit belakangan ini dan dianggap memperburuk krisis keuangan global di seluruh dunia. Krisis *subprime mortgage* menjadi masalah global, baik karena penerapan pinjaman yang buruk di negara-negara, seperti Inggris, Irlandia, dan Spanyol, atau dikarenakan pertumbuhan berkelanjutan di negara-negara, seperti India dan China (Masoud dan Daas, 2014). Hal ini khususnya terjadi ketika kritikus berpendapat bahwa akuntansi nilai wajar memperburuk krisis keuangan tahun 2008 dimana akuntansi nilai wajar dianggap berkontribusi terhadap *leverage* yang berlebihan pada periode kemakmuran dan mengarah kepada *write-downs* yang berlebihan (Laux dan Leuz, 2009).

Para pendukung nilai wajar mengkalim bahwa nilai wajar bermanfaat bagi investor dan meningkatkan transparansi dengan menyediakan pengukuran yang mencerminkan dampak dari kekuatan pasar saat ini terhadap kondisi posisi keuangan perusahaan dan kinerja (Bens *et al*, 2015). Argumen ini dapat dijelaskan dengan asumsi bahwa nilai wajar diestimasi dengan harga pasar yang diperoleh dari pasar aktif. Dengan kondisi tersebut, nilai wajar akan bebas dari subjektifitas (Zijl dan Whittington, 2005). Informasi dalam akuntansi nilai wajar memiliki relevansi nilai yang lebih besar dan menyederhanakan pelaporan keuangan (misalnya, akuntansi lindung nilai) (Song *et al*, 2010). Di sisi lain, pihak kontra berpendapat bahwa nilai wajar kurang andal dan memperkenalkan volatilitas keuangan yang berlebihan (Jiao, 2016). Pendapat lainnya mengatakan bahwa nilai wajar meningkatkan kerugian *write-off* selama kondisi pasar tidak likuid. Terlepas dari likuiditas pasar, ketergantungan terhadap

Hak Cipta Milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

level 2 dan level 3 nilai wajar akan meningkatkan ketidakpastian informasi di pasar.

Kompleksitas dan subjektivitas level 2 dan level 3 akan meningkatkan manipulasi (bias) dan

kesalahan estimasi (*error*) oleh manajemen, sehingga meningkatkan ketidakpastian investor

(Bens *et al*, 2015).

Berkaitan dengan pasar dan risiko, para pendukung berpendapat bahwa *full fair value*

accounting (FFVA) meningkatkan disiplin pasar dan mengungkapkan risiko dari

transformasi jangka waktu serta perubahan risiko kredit lebih awal dari akuntansi biaya

historis. FFVA juga membantu *stakeholders* dalam mengambil tindakan korektif dan

menjaga keamanan serta kesehatan institusi keuangan (Enria *et al*, 2014). Di sisi lain, pihak

kontra berpendapat bahwa akuntansi nilai wajar kurang dapat diverifikasi oleh investor dan

rentan terhadap manipulasi manajerial (Song *et al*, 2010). Akuntansi nilai wajar juga

menciptakan visibilitas jangka pendek yang keliru pada institusi keuangan, khususnya dalam

kasus dana pensiun (Power, 2010).

Pengukuran akuntansi nilai wajar di negara-negara berkembang dianggap tidak relevan

karena berbagai alasan, salah satunya adalah tidak tersedianya pasar yang efisien bagi

banyak aset dan liabilitas yang membuat pengukuran nilai wajar merupakan jenis estimasi

manajemen yang subjektif dan kurang relevan serta tidak dapat diandalkan dalam

pengambilan keputusan (Barth, 2006). Sedangkan Ahmad dan Aladwan (2015) berpendapat

bahwa banyak di negara berkembang seperti Jordan, akuntansi nilai wajar dianggap sebagai

pengukuran yang sesuai dan lebih relevan, hanya masih dipertanyakan apakah informasi

nilai wajar memberikan informasi yang lebih tepat daripada biaya historis di pasar-pasar

berkembang dengan pasar keuangan yang lemah? Dan apakah pengukuran nilai wajar

menurut IFRS dapat atau harus dilaksanakan di pasar tersebut?

Untuk meningkatkan konsistensi dan komparabilitas pelaporan pengukuran nilai wajar,

standar nilai wajar membangun hirarki nilai wajar untuk memprioritaskan *input* yang





digunakan dalam teknik penilaian (PWC, 2015). Ada tiga tingkat dalam hirarki nilai wajar, yaitu *level 1*, *input* teramati yang mencerminkan harga kuotasi untuk aktiva atau liabilitas yang identik di pasar aktif; *level 2*, *input* selain harga kuotasi termasuk dalam *level 1* yang teramati untuk aktiva atau liabilitas baik secara langsung atau tidak langsung; *level 3*, *input* tidak teramati (misalnya, suatu entitas pelaporan atau data entitas lain sendiri).

Penelitian yang dilakukan Kolev (2009) mendokumentasikan hubungan positif yang signifikan antara harga saham dengan nilai wajar aset bersih yang diukur menggunakan hirarki nilai wajar. Namun koefisien estimasi *mark-to-model* secara konsisten lebih rendah daripada *mark-to-market*, meskipun perbedaan signifikan hanya untuk aset bersih *level 3*. Goh *et al* (2009) menemukan bahwa pelaku pasar menilai aset pada *level 2* kurang dari aset *level 1* dan tidak menilai *level 2* dan *level 3* secara berbeda, juga terjadi penurunan tingkat keandalan untuk aset *level 2* dan *level 3* dari kuartel pertama sampai kuartel ketiga tahun 2008 seiring dengan krisis keuangan yang semakin memburuk. Dalam Patrick Bosch (2012) hanya *level 3* nilai wajar yang dirasakan oleh pasar modal kurang dapat diandalkan dibanding *level 1* nilai wajar. Menggunakan sampel dari laporan triwulanan oleh perusahaan perbankan, Song *et al* (2010) menemukan bukti bahwa relevansi nilai dari *level 1* dan *level 2* nilai wajar lebih besar daripada *level 3*. Sebagai tambahan, koefisien pada *level 3* nilai wajar kurang dari 1 yang menunjukkan bahwa investor menganggap adanya masalah keandalan pada aset *level 3*. Song *et al* (2010) juga menunjukkan bahwa perkiraan nilai wajar perusahaan dengan internal kontrol yang kuat atas pelaporan keuangan memiliki nilai relevansi yang lebih besar (yaitu, hubungan yang lebih kuat dengan harga saham).

Riedl dan Serafeim (2009) menemukan bahwa beta tersirat untuk aset keuangan *level 3* relatif signifikan lebih besar dari aset keuangan *level 1* dan *level 2*. Hal ini bersesuaian dengan biaya modal yang lebih tinggi bagi perusahaan dengan eksposur yang lebih besar untuk aset keuangan yang lebih buram, tercermin dalam *level 3*. Penelitian Song *et al* (2010)



menunjukkan bahwa ketidakpastian informasi terkait dengan nilai wajar aset yang lebih buram bisa disebabkan dari dua sumber: pertama, asimetri informasi – karena perkiraan nilai wajar *level 2* dan *level 3* mengandalkan perkiraan manajer dari *input* pasar tidak teramati untuk perusahaan luar; kedua, *errors* – karena mengestimasi tanpa alokasi sumber daya yang cukup, bahkan manajer mungkin tidak tepat dalam membuat perkiraan yang sangat kompleks. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa model FFVA memungkinkan investor untuk lebih menilai risiko perusahaan (Hodder *et al*, 2005). Hal ini karena nilai wajar menginformasikan investor tentang volatilitas ekonomi yang mendasari perusahaan yang lebih mencerminkan keberisikoan perusahaan. Bens *et al* (2015) menemukan bahwa adanya hubungan antara *level 2* dan *level 3* nilai wajar aset dengan pengurangan ketidakpastian secara signifikan pada periode pasca menerima *fair value comment letter* dibandingkan dengan periode sebelum menerima *fair value comment letter*.

Secara substansial, pengukuran nilai wajar mempengaruhi lembaga keuangan karena banyak instrumen keuangan yang dimiliki oleh perusahaan harus dilaporkan pada nilai wajar. Penelitian ini berfokus pada lembaga keuangan berdasarkan beberapa alasan yaitu: pertama, lembaga keuangan memiliki struktur modal dan mode operasi yang unik; kedua, stabilitas industri keuangan secara signifikan berhubungan dengan kesejahteraan ekonomi. Ketika stabilitas sistem keuangan negara terancam, infrastruktur keuangan bisa runtuh tanpa adanya intervensi bank sentral yang mengarah kepada krisis ekonomi. Akibatnya, stabilitas sistem perbankan sangat penting untuk menjaga kesehatan makro ekonomi. Ketiga, dari perspektif mikro, krisis perbankan memiliki dampak nyata pada operasi perusahaan (Magnan *et al*, 2016).

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali apakah hirarki nilai wajar memiliki relevansi nilai dan risiko informasi pada institusi keuangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bukti empiris yang dapat



mendukung penelitian-penelitian terdahulu dan referensi yang bermanfaat untuk memperkuat literatur tentang nilai wajar aset dan liabilitas perusahaan.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis membatasi masalah penelitian dengan memfokuskan pada masalah sebagai berikut:

1. Apakah relevansi nilai atas nilai wajar aset dan liabilitas di *level 1* dan *level 2* lebih tinggi dibandingkan di *level 3*?
2. Apakah risiko informasi atas nilai wajar aset dan liabilitas di *level 3* lebih tinggi dibandingkan di *level 1* dan *level 2*?

C. Batasan Penelitian

Penelitian ini membatasi masalah tentang relevansi nilai dan risiko atas nilai wajar aset dan liabilitas pada institusi keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode penelitian selama empat tahun, yaitu dari tanggal 31 Desember 2012 sampai 31 Desember 2015.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam masalah ini adalah sebagai berikut, “Apakah nilai wajar aset dan liabilitas pada level 1 dan level 2 memiliki relevansi nilai lebih tinggi dibandingkan di level 3 dan nilai wajar aset dan liabilitas di level 3 memiliki risiko informasi lebih tinggi dibandingkan di level 1 dan level 2?”



E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa :

1. Relevansi nilai atas nilai wajar aset dan liabilitas di *level 1* dan *level 2* lebih tinggi dibandingkan di *level 3*.
2. Risiko informasi atas nilai wajar aset dan liabilitas di *level 3* lebih tinggi dibandingkan di *level 1* dan *level 2*.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu diantaranya :

1. Bagi investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat bagi para investor tentang relevansi dan risiko informasi dalam hirarki nilai wajar perusahaan dalam pengambilan keputusan investasinya.

2. Bagi perusahaan – perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu manajer dan pembuat kebijakan perusahaan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penerapan hirarki nilai wajar sehingga dapat membantu para pemakai laporan keuangan perusahaan dalam mengurangi risiko investasi dan meningkatkan nilai perusahaan.

3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bukti empiris mengenai penerapan hirarki nilai wajar dan memberikan masukan yang bermanfaat bagi penelitian-penelitian sejenis maupun lanjutan mengenai nilai wajar serta dapat menjadi referensi dalam literatur akademik mengenai akuntansi nilai wajar dalam pelaporan keuangan.